**PERAN MAHASISWA sebagai Kontrol Sosial: Studi Aksi Demonstrasi Menolak Tunjangan DPR Tahun 2025**

**oleh:**

**anesha aqila dealova**

**2416041098**

**tugas metode penelitian administrasi publik**

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

**Fakultas ISIP Universitas Lampung**

****

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

 **Universitas Lampung**

**Bandar Lampung**

**20 September 2025**

**BAB 2**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang peran mahasiswa sebagai agen kontrol sosial telah berkembang luas, baik dalam lingkup nasional maupun global. Meski demikian, sebagian besar studi yang tersedia masih terpusat pada aspek-aspek seperti dorongan individual mahasiswa, pola mobilisasi massa, serta peran media sosial dalam aksi demonstrasi. Pendekatan tersebut belum secara komprehensif mengkaji hubungan antara gerakan mahasiswa dengan mekanisme pengawasan terhadap kebijakan publik serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Salah satu studi kuantitatif yang relevan dalam menganalisis peran mahasiswa sebagai aktor kontrol sosial adalah penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani dan Nugroho (2023), berjudul *"Political Opportunity Structure and Framing in Indonesian Student Protests: Evidence from the #ReformasiDikorupsi Movement."* Penelitian ini secara khusus menyoroti dinamika gerakan mahasiswa yang terjadi pada tahun 2019, yang dikenal luas melalui tagar #ReformasiDikorupsi sebagai simbol perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang metodologis dan sistematis, studi ini mengintegrasikan sejumlah variabel penting yang berkaitan dengan struktur peluang politik dan strategi framing dalam konteks gerakan sosial. Relevansi penelitian ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan fenomena penolakan kebijakan tunjangan hunian DPR tahun 2025, karena variabel-variabel yang digunakan memiliki kesesuaian konseptual dengan dinamika protes mahasiswa kontemporer. Selain itu, penggunaan metode analisis statistik yang komprehensif dalam penelitian tersebut memberikan landasan empiris yang kokoh untuk memahami pola partisipasi politik mahasiswa, serta faktor-faktor yang memengaruhi intensitas dan arah gerakan mereka. Dengan demikian, studi ini menjadi rujukan penting dalam membangun kerangka analisis terhadap efektivitas gerakan mahasiswa sebagai mekanisme pengawasan publik dan pendorong reformasi kebijakan.

Dalam studi yang dilakukan oleh Ramadhani dan Nugroho, pendekatan metodologis yang digunakan adalah survei kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada total 400 responden mahasiswa. Para responden berasal dari lima kota metropolitan di Indonesia, yakni Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan, yang dipilih secara strategis untuk mencerminkan keragaman geografis dan dinamika sosial-politik lokal. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, di mana hanya mahasiswa yang memiliki pengalaman langsung dalam aksi demonstrasi atau aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan yang dijadikan subjek penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh berasal dari individu yang memiliki keterlibatan nyata dalam gerakan sosial dan politik kampus. Instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur yang menggunakan skala Likert lima poin (1–5), dirancang untuk mengukur sejumlah variabel kunci yang berkaitan dengan struktur peluang politik, strategi framing gerakan, serta tingkat partisipasi mahasiswa dalam aksi kolektif. Dengan desain seperti ini, penelitian Ramadhani dan Nugroho memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika gerakan mahasiswa secara empiris, sekaligus menawarkan model analisis yang dapat diaplikasikan dalam konteks protes mahasiswa terhadap kebijakan DPR tahun 2025.

Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi logistik, yang dipilih secara tepat karena variabel dependen yang dianalisis bersifat kategorikal, yakni apakah responden mahasiswa terlibat atau tidak dalam aksi demonstrasi. Dari hasil analisis statistik, diperoleh sejumlah temuan penting yang memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi mahasiswa dalam gerakan protes. Temuan pertama menunjukkan bahwa persepsi terhadap ketidakadilan memiliki pengaruh paling dominan dan signifikan terhadap keterlibatan mahasiswa dalam aksi kolektif (p<0.01). Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat ketidakadilan yang dirasakan oleh mahasiswa terhadap kebijakan publik, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk terlibat aktif dalam demonstrasi. Temuan kedua mengindikasikan bahwa efikasi politik juga berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap partisipasi mahasiswa (p<0.05), yang berarti bahwa keyakinan mereka terhadap kemampuan tindakan kolektif untuk memengaruhi kebijakan menjadi pendorong penting dalam keputusan untuk turun ke jalan. Sementara itu, temuan ketiga menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara tingkat kepercayaan terhadap DPR dan partisipasi dalam aksi protes (p<0.01). Artinya, semakin rendah tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap lembaga legislatif, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan dan tuntutan perubahan.

Jika dibandingkan penelitian ini, penelitian Ramadhani dan Nugroho menawarkan perspektif yang berbeda secara metodologis maupun analitis. Dokumen tersebut lebih menekankan pada pemahaman normatif dan historis mengenai peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial dan politik, dengan penekanan khusus pada keterlibatan mereka dalam menolak kebijakan tunjangan hunian DPR tahun 2025. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif, dengan fokus pada narasi peran mahasiswa dalam berbagai momentum politik, namun belum mengintegrasikan pengukuran kuantitatif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi mereka dalam aksi protes. Sebaliknya, studi Ramadhani dan Nugroho mengadopsi pendekatan empiris berbasis data kuantitatif, yang memungkinkan identifikasi hubungan antar variabel secara terukur dan valid. Dengan menggunakan teknik analisis statistik, penelitian tersebut menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas, serta memberikan dasar yang lebih kuat untuk formulasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun membahas tema yang serupa, yakni keterlibatan mahasiswa dalam kontrol sosial, masing-masing memberikan kontribusi yang unik: satu dalam bentuk refleksi historis dan normatif, dan yang lainnya dalam bentuk analisis empiris yang dapat dioperasionalkan dalam konteks kebijakan publik.

1. **Teory dan Konsep**

 Teori Tata Kelola (Governance Theory) memiliki relevansi yang mendalam dengan fokus penelitian berjudul *“Peran Mahasiswa sebagai Kontrol Sosial dalam Menolak Kebijakan DPR tentang Tunjangan Hunian Rp100 Juta per Bulan Tahun 2025.”* Dalam perspektif teori ini, pemerintahan kontemporer tidak lagi dipahami sebagai entitas yang dijalankan secara eksklusif oleh aktor negara, melainkan sebagai sistem yang melibatkan berbagai elemen non-pemerintah dalam suatu jaringan kolaboratif yang disebut *network governance* (Rhodes, 1996). Elemen-elemen tersebut mencakup masyarakat sipil, sektor swasta, media, serta organisasi non-pemerintah yang bersama-sama berperan dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan publik. Dalam konteks penelitian ini, DPR berfungsi sebagai aktor negara yang memiliki kewenangan formal dalam menetapkan kebijakan, sementara mahasiswa diposisikan sebagai bagian dari masyarakat sipil yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara horizontal. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dapat dipahami sebagai bentuk intervensi sosial yang bertujuan untuk mengoreksi ketimpangan kekuasaan, khususnya ketika proses kebijakan berlangsung tanpa transparansi dan akuntabilitas yang memadai. Dengan demikian, gerakan mahasiswa tidak hanya mencerminkan ekspresi ketidakpuasan publik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.

 Kebijakan DPR terkait pemberian tunjangan hunian dengan nilai yang sangat tinggi telah memicu krisis legitimasi publik, karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam kerangka Governance Theory, sebagaimana dirumuskan oleh UNDP (1997), tata kelola yang ideal harus mencerminkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas kebijakan, serta kepatuhan terhadap hukum (*rule of law*). Dalam konteks ini, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa tidak semata-mata merupakan bentuk ekspresi ketidakpuasan atau perlawanan terhadap kebijakan, melainkan juga berfungsi sebagai mekanisme korektif dalam sistem pemerintahan. Melalui gerakan tersebut, mahasiswa berupaya mendorong keterbukaan informasi dan menuntut pertanggungjawaban dari DPR atas kebijakan yang dianggap tidak adil dan tidak akuntabel. Dengan demikian, demonstrasi mahasiswa dapat dipahami sebagai bagian integral dari proses tata kelola yang sehat, di mana masyarakat sipil berperan aktif dalam mengawasi dan mengimbangi kekuasaan negara. Aksi ini juga memperkuat hubungan antara masyarakat dan institusi pemerintahan, serta menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam menjaga integritas dan legitimasi kebijakan publik.

1. Middle Theory

Konsep *Political Opportunity Structure* (POS), yang dikategorikan sebagai middle-range theory, memiliki peran penting dalam menjelaskan dinamika kemunculan dan perkembangan gerakan sosial. Teori ini memberikan kerangka analitis untuk memahami kondisi-kondisi eksternal yang memungkinkan masyarakat sipil melakukan mobilisasi politik secara efektif. Menurut Tarrow (2011), gerakan sosial cenderung muncul dan memperoleh kekuatan ketika terdapat celah atau peluang dalam struktur politik, seperti krisis legitimasi pemerintah, keterbukaan akses terhadap media, dukungan dari kelompok koalisi, serta lemahnya mekanisme pengawasan formal. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan DPR mengenai tunjangan hunian yang kontroversial menjadi pemicu terbentuknya peluang politik yang dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi. Selain itu, intensitas penggunaan media sosial yang sangat tinggi pada tahun 2025 turut memperkuat proses mobilisasi, sehingga gerakan mahasiswa tidak hanya berlangsung secara fisik di ruang publik, tetapi juga meluas ke ranah digital. Aksi ini berkembang menjadi gerakan daring yang terstruktur dan mampu menarik perhatian masyarakat secara nasional. Dengan demikian, teori POS memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai bagaimana dan mengapa demonstrasi mahasiswa tahun 2025 dapat bertransformasi menjadi gerakan sosial yang masif dan terorganisir.

1. Grand Theory

Pada level makro, penelitian ini mengadopsi *Grand Theory* berupa Teori Sistem Sosial yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Dalam kerangka pemikiran Parsons (1951), masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi dan saling menopang guna mempertahankan stabilitas atau *equilibrium*. Melalui paradigma AGIL yang menjadi inti dari teori ini, Parsons mengidentifikasi empat fungsi utama yang harus dijalankan oleh setiap sistem sosial, yakni Adaptation (penyesuaian terhadap lingkungan), Goal Attainment (pencapaian tujuan kolektif), Integration (koordinasi dan kohesi antar elemen sosial), serta Latency (pemeliharaan pola dan nilai-nilai budaya). Dalam konteks penelitian ini, mahasiswa diposisikan sebagai bagian dari subsistem sosial yang memainkan peran krusial dalam fungsi Integration dan Goal Attainment. Mereka berperan dalam menjaga keteraturan sosial serta mendorong pencapaian tujuan bersama dalam kerangka sistem politik yang demokratis dan berkeadilan. Ketika DPR mengeluarkan kebijakan yang dinilai menimbulkan ketimpangan dan mengganggu keseimbangan sosial—seperti kebijakan tunjangan hunian yang bernilai sangat besar, mahasiswa merespons melalui aksi demonstrasi sebagai bentuk koreksi terhadap disfungsi sistem. Dengan demikian, gerakan mahasiswa tidak dapat dipahami semata sebagai reaksi emosional atau spontan, melainkan sebagai bagian dari mekanisme sosial yang berfungsi untuk memulihkan stabilitas dan memastikan keberlangsungan sistem politik serta tata kelola pemerintahan yang sehat.

1. Applied Theory

*Theory*, yang menekankan bahwa tata kelola pemerintahan modern tidak lagi bersifat hierarkis dan terpusat, melainkan dijalankan melalui jaringan kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan media (Rhodes, 1996). Dalam konteks studi ini, DPR sebagai institusi yang menetapkan kebijakan tunjangan hunian sebesar Rp100 juta per bulan berperan sebagai aktor negara, sementara mahasiswa diposisikan sebagai bagian dari masyarakat sipil yang menjalankan fungsi pengawasan horizontal. Peran mahasiswa dalam aksi demonstrasi tahun 2025 tidak hanya mencerminkan ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme korektif dalam sistem demokrasi. Melalui aksi kolektif, mahasiswa menuntut transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan, sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dirumuskan oleh UNDP (1997). Oleh karena itu, demonstrasi mahasiswa dapat dipahami sebagai bagian integral dari praktik tata kelola pemerintahan yang sehat, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara dan masyarakat serta memastikan bahwa kebijakan publik tetap berpihak pada kepentingan umum.

1. **Kerangka Berfikir**

Bertolak dari landasan teoritis dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, studi ini diarahkan untuk mengkaji keterkaitan antara persepsi serta tingkat partisipasi mahasiswa dengan efektivitas aksi demonstrasi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya terkait alokasi tunjangan hunian sebesar Rp100 juta per bulan yang direncanakan pada tahun 2025. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana persepsi kritis dan keterlibatan aktif mahasiswa dalam aksi kolektif dapat memengaruhi daya tekan gerakan terhadap kebijakan publik yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan teoritis berlapis untuk memperkuat fondasi konseptual, dengan mengintegrasikan tiga tingkatan teori: grand theory, middle-range theory, dan applied theory. Ketiganya digunakan secara komplementer untuk menjelaskan dinamika hubungan antara persepsi dan partisipasi mahasiswa dengan efektivitas aksi demonstrasi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan DPR mengenai tunjangan hunian sebesar Rp100 juta per bulan pada tahun 2025.

1. **Middle Theory – Political Opportunity Structure (POS)**

Sebagai kerangka meso, teori *Political Opportunity Structure* (Tarrow, 2011) digunakan untuk menjelaskan kondisi-kondisi yang memungkinkan munculnya gerakan sosial. Teori ini menyoroti bahwa gerakan seperti demonstrasi mahasiswa cenderung muncul ketika terdapat peluang politik yang terbuka, misalnya krisis legitimasi pemerintah, meningkatnya akses terhadap informasi publik, serta adanya dukungan sosial yang luas. Dalam penelitian ini, persepsi mahasiswa terhadap ketidakadilan kebijakan DPR (variabel X1) dan partisipasi aktif mereka dalam memanfaatkan peluang politik di era digital (variabel X2) diasumsikan memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas aksi demonstrasi (variabel Y). Dengan kata lain, POS menjadi kerangka yang menjelaskan bagaimana dan kapan mahasiswa memilih untuk bertindak secara kolektif sebagai bentuk kontrol sosial.

1. **Grand Theory – Teori Sistem Sosial oleh Talcott Parsons**

Sebagai kerangka makro, teori sistem sosial Parsons (1951) memandang masyarakat sebagai suatu entitas yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi untuk mempertahankan keseimbangan sosial (*social equilibrium*). Dalam konteks ini, DPR diposisikan sebagai salah satu subsistem yang memiliki fungsi utama dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan publik. Ketika DPR mengeluarkan kebijakan yang dinilai tidak adil atau tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial—seperti kebijakan tunjangan hunian yang kontroversial—maka terjadi gangguan terhadap keseimbangan sistem. Mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat sipil, berperan sebagai agen korektif yang melakukan intervensi melalui aksi demonstrasi guna mengembalikan keseimbangan sosial dengan menuntut revisi atau pembatalan kebijakan tersebut.

1. **Applied Theory – Governance Theory**

Sebagai kerangka mikro yang aplikatif, *Governance Theory* (Rhodes, 1996) menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang inklusif dan kolaboratif, di mana aktor-aktor non-pemerintah seperti masyarakat sipil turut berperan dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, mahasiswa berfungsi sebagai pengawas horizontal yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dari lembaga legislatif seperti DPR. Efektivitas aksi demonstrasi diukur melalui dampaknya terhadap perubahan kebijakan dan peningkatan kualitas tata kelola publik. Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka evaluatif terhadap sejauh mana gerakan mahasiswa mampu mendorong reformasi kebijakan dan memperkuat prinsip *good governance*.

1. **Hubungan Antarvariabel Penelitian**
2. Persepsi Mahasiswa terhadap Kebijakan DPR (X1) → Efektivitas Aksi Demonstrasi (Y)

Persepsi mahasiswa terhadap kebijakan DPR adalah bagaimana mahasiswa menafsirkan dan menilai kebijakan tunjangan hunian yang dikeluarkan DPR. Persepsi ini dipengaruhi oleh pemahaman mahasiswa tentang keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.

Apabila mahasiswa menilai kebijakan tersebut sebagai tidak adil, kurang transparan, dan tidak pro-rakyat, maka hal ini dapat memicu ketidakpuasan yang berkembang menjadi kemarahan kolektif. Kondisi ini mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam aksi protes sebagai bentuk perlawanan.

Persepsi negatif yang dimiliki mahasiswa juga memperkuat motivasi internal mereka untuk aktif berpartisipasi dalam demonstrasi, karena mereka merasa memiliki tanggung jawab moral sebagai agen perubahan sosial. Ketika persepsi ini berkembang dan dipegang bersama oleh kelompok yang lebih luas, aksi demonstrasi menjadi lebih terarah dan efektif, karena dilandasi oleh kesadaran serta pemahaman yang mendalam mengenai isu yang diperjuangkan.

1. Partisipasi Mahasiswa dalam Aksi Demonstrasi (X2) → Efektivitas Aksi Demonstrasi (Y)

Partisipasi mahasiswa merujuk pada keterlibatan mereka dalam aksi demonstrasi, baik secara langsung (turun ke lapangan) maupun tidak langsung (dukungan lewat media sosial, donasi, atau kegiatan organisasi). Tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan solidaritas kolektif dan memperkuat legitimasi gerakan di mata publik.

Menurut teori gerakan sosial, semakin banyak peserta dan semakin kuat jaringan organisasi, maka tekanan politik terhadap pembuat kebijakan akan semakin besar. Partisipasi juga mendukung mobilisasi sumber daya seperti logistik dan strategi komunikasi yang berkontribusi pada efektivitas demonstrasi.

1. Efektivitas Aksi Demonstrasi sebagai Kontrol Sosial (Y)

Efektivitas aksi demonstrasi merujuk pada sejauh mana gerakan mahasiswa mampu mencapai tujuan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Indikator efektivitas mencakup:

1. Dampak terhadap kebijakan DPR, seperti revisi atau pembatalan kebijakan yang dinilai bermasalah.
2. Terbukanya ruang dialog antara mahasiswa, DPR, dan pemerintah untuk membahas isu secara lebih terbuka.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap proses legislasi.
4. Perubahan perilaku DPR menuju praktik yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan.

Efektivitas ini juga mencerminkan keberhasilan mahasiswa dalam menjalankan fungsi pengawasan horizontal dalam sistem demokrasi. Sebaliknya, jika demonstrasi hanya menimbulkan kegaduhan tanpa hasil konkret, maka efektivitasnya dinilai rendah.

1. Hubungan Simultan (X1 dan X2 → Y)

Selain dianalisis secara individual, variabel persepsi mahasiswa (X1) dan partisipasi mahasiswa (X2) juga diuji secara simultan untuk menilai dampak kolektif terhadap efektivitas aksi demonstrasi (Y). Persepsi negatif terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam aksi protes. Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin besar pula tekanan politik yang dapat diberikan, sehingga efektivitas demonstrasi meningkat. Dengan demikian, persepsi negatif berfungsi sebagai pemicu, sementara partisipasi bertindak sebagai penguat dalam membentuk gerakan yang berdampak.

* 1. **Hipotesis Penelitian**
1. Pengaruh Persepsi Mahasiswa terhadap Efektivitas Aksi Demonstrasi
* H₀₁ (Hipotesis Nol 1)
Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi mahasiswa terhadap kebijakan DPR dan efektivitas aksi demonstrasi sebagai kontrol sosial.
* Hₐ₁ (Hipotesis Alternatif 1)
Terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi mahasiswa terhadap kebijakan DPR dan efektivitas aksi demonstrasi sebagai kontrol sosial.

Persepsi negatif mahasiswa terhadap kebijakan DPR yang tidak transparan dan tidak adil akan mendorong kesadaran kritis dan motivasi kolektif untuk melakukan aksi demonstrasi yang efektif.

1. Pengaruh Partisipasi Mahasiswa terhadap Efektivitas Aksi Demonstrasi
* H₀₂ (Hipotesis Nol 2)
Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi mahasiswa dalam aksi demonstrasi dan efektivitas aksi demonstrasi sebagai kontrol sosial.
* Hₐ₂ (Hipotesis Alternatif 2)
Terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi mahasiswa dalam aksi demonstrasi dan efektivitas aksi demonstrasi sebagai kontrol sosial.

Partisipasi mahasiswa yang tinggi, baik dalam aksi lapangan maupun kampanye digital, memperkuat daya tekan politik dan solidaritas gerakan sehingga meningkatkan keberhasilan demonstrasi.

1. Pengaruh Persepsi dan Partisipasi Mahasiswa secara Simultan terhadap Efektivitas Aksi Demonstrasi
* H₀₃ (Hipotesis Nol 3)
Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara persepsi mahasiswa dan partisipasi mahasiswa terhadap efektivitas aksi demonstrasi sebagai kontrol sosial.
* Hₐ₃ (Hipotesis Alternatif 3)
Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara persepsi mahasiswa dan partisipasi mahasiswa terhadap efektivitas aksi demonstrasi sebagai kontrol sosial.

Persepsi negatif memicu partisipasi aktif, dan jika keduanya saling menguatkan, maka demonstrasi mahasiswa akan lebih efektif dalam memengaruhi DPR untuk memperbaiki kebijakan sesuai prinsip *good governance*.

**Daftar Pustaka**

AP News. (2025, January 19). Riot police clash with students protesting lawmakers' allowances in Indonesia. AP News. <https://apnews.com/article/49e31c7074aab8375aec06143f6b2edc>

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

CSIS. (2025, January 20). Indonesia protests amid economic anxieties and police violence. Center for Strategic and International Studies. <https://www.csis.org/analysis/indonesia-protests-amid-economic-anxieties-and-police-violence>

Fithriyatirrizqoh, D. (2024). Mengkaji keefektifan gerakan mahasiswa dalam mendorong transparansi kebijakan publik. Jurnal Ilmu Wawasan Politik, 9(1), 33–47. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/9493/7622>

Hakeu, M., & Alim, A. (2024). Peran administrasi publik dalam mempercepat pembangunan berkelanjutan di era digital. Jurnal Ilmu Mandalika, 8(1), 55–67.

Indonesia at Melbourne. (2025, January 21). Out of touch: Why an increase in politicians' allowances triggered mass protests. <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/out-of-touch-why-an-increase-in-politicians-allowances-triggered-mass-protests>

Parsons, T. (1951). *The social system*. Free Press.

Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. Political Studies, 44(4), 652–667. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x>

Setyoko, P. (2020). Gerakan mahasiswa sebagai agen perubahan dalam penguatan demokrasi. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Demokrasi, 5(2), 112–123. <https://jppd.org/index.php/jppd/article/download/15/14>

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tarrow, S. (2011). *Power in movement: Social movements and contentious politics* (3rd ed.). Cambridge University Press.

United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. United Nations Development Programme.